



Strategi Aparatur Gampong dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus Gampong Seutui Kota Banda Aceh)

Lia Dasfita

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
e-mail: 210802078@student.ar-raniry.ac.id

Firda Amrina

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
e-mail: 220802036@student.ar-raniry.ac.id

Reja Pahlevi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
e-mail: 220802062@student.ar-raniry.ac.id

Siti Sarah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
e-mail: 200802031@student.ar-raniry.ac.id

Juni Rahmat

PT Pertamina EP Pangkalan Susu field, Langkat
e-mail: Junirahmat@ar-raniry.ac.id

Abstract

The Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program is a government initiative designed to reduce slums in urban areas by empowering communities and strengthening local institutions. This research aims to analyze the strategies employed by village officials to implement the KOTAKU program in Gampong Setui, Baiturrahman District, Banda Aceh City. Using a qualitative method, this study collected data through interviews, observation, and documentation. The findings revealed that the program's implementation in Gampong Setui faced several significant challenges, including a lack of coordination among institutions, low community participation, and a limited budget. To address these obstacles, village officials adopted various strategies. These included enhancing coordination through regular meetings, mapping priority areas for intervention, and forming a dedicated Community Self-Help Agency (BKM) to manage the program. The BKM was specifically tasked with overseeing program implementation and fostering community economic empowerment. Despite these efforts, a major hurdle remains: the lack of community participation in maintaining the newly built infrastructure, which directly impacts the program's long-term sustainability. This research underscores the need for more intensive interventions, such as focused socialization, deeper community engagement, and continuous monitoring and evaluation. It confirms that a collaborative approach, tailored to the specific needs of the local community, is essential for the success of the KOTAKU program. The study concludes with recommendations to strengthen inter-agency coordination and explore technological innovations to improve future program management.

Keywords: KOTAKU Program; Village Government Strategy; Community Participation; Institutional Strengthening; Aceh.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi, pertumbuhan kota menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara. Namun kota-kota besar di Indonesia seiring berjalan waktu mengalami pertumbuhan pesat. Kepadatan ini tentu menimbulkan beberapa problematika, salah satunya yaitu timbulnya permukiman kumuh (Fitri Yulia et al., 2024; Maulana & Ahmady, 2022; Zahratuddini et al., 2022). Permukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan dengan jumlah penduduk terpadat (lebih dari 500 jiwa), situasi kondisional ekonomi yang rendah, jumlah rumah yang sangat banyak dan kawasan dibawah standar, dimana infrastruktur tidak ada atau belum melewati persyaratan teknis dan persyaratan Kesehatan (Afrina, 2021). Kondisi ini mengancam kesehatan dan keberlanjutan hidup penghuninya.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh tidak memiliki standar huni yang layak, rawan penyakit sosial, dan menjadi masalah serius seperti kawasan yang rentan terhadap aktivitas kriminal, peredaran narkoba, dan minuman keras. Wilayah-wilayah ini sering kali terpinggirkan, menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk segera ditangani (Maulana & Ahmady, 2022).

Banda Aceh sebagai ibu kota dari Provinsi Aceh, pusat ekonomi, politik dan budaya juga tidak luput dari permasalahan kawasan kumuh ini, tercatat pada tahun 2014 6,136 ha luas wilayah yang menjadi kawasan kumuh meskipun begitu pemerintah daerah telah mengupayakan perihal kawasan kumuh ini dengan mengadakan program *KOTAKU* (kawasan tanpa kumuh) berdasarkan data wilayah kumuh Banda Aceh tahun 2018 terdapat 40 gampong yang memiliki kawasan kumuh tercatat dalam program *KOTAKU* ini salah satunya di kecamatan baiturrahman gampong Setui Banda Aceh (Afrizal, 2019).

Gampong Setui di Kecamatan Baiturrahman menjadi salah satu lokasi prioritas pelaksanaan Program *KOTAKU*, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh No. 372 Tahun 2014. Namun, implementasi program ini sering menghadapi berbagai hambatan. Fenomena di lapangan menurut hasil observasi awal dan temuan dari berbagai sumber media menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan program, permasalahan yang sama terus muncul. Pertama, terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan aparatur gampong. Kurangnya pemahaman dan keterlibatan dari pihak-pihak terkait dapat mengakibatkan duplikasi tugas dan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program. Kedua, masyarakat juga seringkali kurang berpartisipasi dalam program ini.

Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat program membuat masyarakat cenderung apatis. Ketiga, faktor pendanaan menjadi kendala penting. Banyak program yang terhambat akibat alokasi anggaran yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan data dan laporan dari Kementerian PUPR dan media massa, tantangan utama program ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang seringkali apatis terhadap inisiatif pemerintah. Misalnya, melalui pemberitaan di berbagai portal berita daring dan laporan di media sosial, sering kali ditemukan keluhan terkait kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Alih-alih merawat, fasilitas publik seperti jalan setapak, drainase, atau MCK yang baru diperbaiki seringkali rusak kembali akibat minimnya kesadaran kolektif untuk menjaganya. Ini menunjukkan adanya jurang antara strategi yang dirancang pemerintah dan implementasi di tingkat akar rumput

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan target RPJMN 2015-2019, yaitu menciptakan kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya meluncurkan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Damanik, 2022; Idawati, 2020; Zubaidah et al., 2023). Program ini berfungsi sebagai platform kolaborasi yang mendorong pemerintah daerah untuk memimpin penanganan permukiman kumuh dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, salah satunya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Tujuan utama program ini adalah menciptakan kota yang bersih, nyaman, dan sehat bagi seluruh warganya (Karina et al., 2022; Maulana & Ahmady, 2022).

Namun, pelaksanaannya menimbulkan keluhan masyarakat tentang kurangnya sosialisasi yang efektif. Banyak warga yang merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan, sehingga mereka tidak melihat program ini sebagai milik mereka sendiri. Kondisi ini diperparah dengan observasi awal di lapangan yang menunjukkan adanya miskoordinasi antar lembaga, seperti keterlambatan pencairan dana atau ketidaksinambungan kebijakan antara tingkat gampong dan kabupaten.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan peran aparatur Gampong sebagai pemimpin dalam Program KOTAKU untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan efektif. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pencegahan dan perbaikan kualitas permukiman kumuh. Selain itu, peran aparatur Gampong dalam memberikan edukasi dan penyuluhan juga sangat diperlukan guna mendorong partisipasi masyarakat, sehingga Kecamatan Baiturrahman, khususnya Gampong Seutui, Banda Aceh, dapat terbebas dari masalah permukiman kumuh.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi aparatur gampong dalam implementasi program kota tanpa kumuh di Kecamatan Baiturrahman *Gampong seutui*, Banda Aceh. Dengan menganalisis partisipasi pemangku kepentingan ,diharapkan dapat menemukan solusi-solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan program kota tanpa kumuh di wilayah tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menarik dilakukan karena penelitian ini mengungkap orisinalitas signifikan dengan memfokuskan pada strategi aparatur gampong dalam mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Setui, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji efektivitas atau implementasi program secara umum, studi ini secara spesifik menyoroti peran sentral aparatur gampong sebagai aktor kunci dalam proses kebijakan.

Studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Ardila et al., 2021) (Mesi Sulastri, Efendi, 2021) (Triastutu et al., 2019) (Idawati, 2020; Zahratuddini et al., 2022) lebih berfokus pada tahapan implementasi dan efektivitas program di lokasi tersebut. Analisis mereka menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan baik dan mencapai tujuan, berbagai hambatan seperti kekurangan dana dan sumber daya manusia masih menjadi isu. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana strategi aparatur gampong berperan dalam mengatasi kendala-kendala ini.

Selain itu, penelitian ini mengambil Gampong Setui sebagai lokasi studi kasus yang unik dan belum pernah diteliti sebelumnya dalam literatur yang disediakan. Meskipun Gampong Jawa, yang juga berada di Banda Aceh, pernah menjadi objek studi, penelitian tersebut lebih berfokus pada identifikasi penyebab kawasan kumuh seperti TPA dan bangunan ilegal pasca-tsunami. Dengan memilih Gampong Setui, penelitian ini menawarkan konteks geografis dan sosial yang berbeda, memungkinkan analisis yang lebih kaya mengenai adaptasi strategi KOTAKU pada karakteristik spesifik wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan teoretis tetapi juga memberikan kontribusi empiris baru yang relevan bagi pengembangan kebijakan di tingkat lokal

B. Metode penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (John W. Creswell, 2009). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan melalui pengamatan fenomena-fenomena yang dialami oleh masyarakat dengan pengamatan secara mendalam melingkupi pengalaman subjek yang dianggap muncul dari permasalahan sosial yang dijelaskan oleh Moleong, bahwa pendekatan deskriptif menjelaskan secara jelas dalam bentuk kata-kata dan Bahasa (Adiwijaya & Harefa, 2024). Dalam penelitian ini peneliti membahas suatu masalah dengan cara menguraikan secara jelas dan kompleks berdasarkan pemahaman peneliti melalui wawancara masyarakat *gampong seutui* terutama pada kawasan kumuh tersebut.

Pengambilan informan dilakukan dengan metode purposive sampling (Fitri Yulia et al., 2024), dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari masyarakat yang tinggal di *gampong kumuh* tersebut, tokoh masyarakat, serta aparat *gampong Seutui* setempat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemangku kepentingan, serta data sekunder yang berasal dari bahan lapangan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara dengan masyarakat *gampong Seutui*, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2020).

C. Hasil Penelitian

Strategi Aparatur Gampong dalam Mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh di Gampong seutui

Strategi merupakan langkah yang dirancang dan dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Menurut Teori Korten (Meisy M. P. Bidara, Wiesje F. Wilar, 2022) strategi adalah panduan atau peta jalan yang dirumuskan secara matang untuk menghadapi tantangan dan meraih tujuan organisasi melalui langkah-langkah spesifik dan terstruktur. Korten menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai konteks sosial dan dinamis yang melingkupi organisasi, serta perlunya fleksibilitas dalam penerapan strategi. Dengan demikian, strategi bukan hanya sekedar rencana statis, tetapi harus mampu beradaptasi dengan

perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Strategi yang efektif yang harus di pertimbangkan oleh para aparatur gampong adalah kondisi internal, potensi sumber daya, serta tantangan eksternal agar dapat diimplementasikan secara optimal demi pencapaian hasil yang diharapkan.

1. Strategi organisasi

Aparatur Gampong Seutui memainkan peran yang sangat penting dalam tahap perumusan kebijakan, terutama dalam merancang kebijakan yang dapat mengatasi masalah utama di kawasan kumuh. Dalam konteks ini, strategi yang digunakan oleh aparatur gampong melibatkan berbagai pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan dan efektivitas program. Pelibatan masyarakat lokal merupakan salah satu strategi utama yang digunakan aparatur gampong dalam perumusan kebijakan. Dalam hal ini, aparat desa atau gampong melakukan musyawarah secara rutin yang melibatkan warga setempat, untuk menggali berbagai aspirasi dan kebutuhan mereka terkait dengan perbaikan kawasan kumuh. Melalui forum-forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan masalah yang mereka hadapi, yang seringkali tidak dapat terdeteksi tanpa adanya partisipasi mereka. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan karena berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

Musyawarah ini bukan hanya untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk mencari solusi bersama. Dalam setiap musyawarah, aparatur gampong mengajak masyarakat untuk berpikir kritis dan menyarankan ide-ide kreatif yang bisa diimplementasikan dalam kebijakan yang akan dirumuskan. Selanjutnya aparatur gampong melakukan Pemetaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kawasan mana yang paling membutuhkan perhatian dan intervensi, berdasarkan tingkat kekumuhan yang ada.

Proses pemetaan ini melibatkan pengumpulan data mengenai kondisi fisik kawasan kumuh, seperti kualitas infrastruktur jalan, sistem drainase, akses terhadap air bersih, dan kualitas rumah yang ada di wilayah tersebut. Data-data ini sangat penting sebagai landasan dalam merancang kebijakan yang spesifik dan terfokus pada kebutuhan yang mendesak. Dengan pemetaan yang akurat, strategi intervensi kebijakan dapat lebih terarah, dan alokasi anggaran dapat diprioritaskan untuk daerah-daerah yang paling membutuhkan. Selain itu, pemetaan ini juga membantu untuk menentukan area mana yang membutuhkan perbaikan infrastruktur, sehingga upaya perbaikan lebih efektif dan efisien.

2. Strategi Sumber Daya

Sumber daya secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan atau tenaga yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong suatu mekanisme atau kegiatan tertentu agar menghasilkan sesuatu. Strategi sumber daya berfokus pada upaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya penting yang ada untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Salah satu sumber daya utama yang diperlukan adalah sumber daya manusia (SDM), yang sangat vital dalam menjalankan suatu program. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Gampong Seutui untuk pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat, dengan total anggaran mencapai hampir 14 miliar rupiah. Infrastruktur yang dibangun cukup beragam untuk mengatasi masalah kawasan kumuh di Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Namun, dalam pelaksanaan program KOTAKU di Gampong Seutui, terdapat kendala berupa kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mencapai kesuksesan program tersebut. Sebagian masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KOTAKU, serta kurangnya keterlibatan mereka dalam upaya menciptakan permukiman yang layak huni dan terbebas dari kawasan kumuh.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian, partisipasi masyarakat dalam program ini tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun, padahal infrastruktur tersebut seharusnya memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Strategi Program

Dalam indikator strategi program. Menurut Chandler strategi adalah alat yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memprioritaskan alokasi sumber daya (Haekal et al., 2024; Hariyanti et al., 2019). Dalam penelitian ini hasil wawancara mendapatkan bahwa di *gampong seutui*. Strategi program yang diberikan yaitu untuk mengurangi kawasan kumuh untuk kualitas hidup masyarakat dan pembangunan fasilitas umum seperti jalan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Setui.

Tidak hanya Masyarakat Seutui, masyarakat luar pun ikut memanfaatkan jalan yang sudah di bangun tersebut sebagai *sport track jogging* yang dulu nya kawasan sangat kumuh

dan banyak sampah sekarang menjadi lebih baik. Tapi sayangnya masyarakat di *gampong seutui* tidak bisa merawat dengan baik banyak fasilitas-fasilitas yang rusak dan tidak terawat di karenakan kurangnya dana dari pemerintah. Dan fasilitas lain juga dibangun seperti pembangunan gedung Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) diharapkan dapat menambah penghasilan masyarakat *Gampong seutui* dan sekitarnya.

4. Strategi Kelembagaan

Dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (*KOTAKU*) di *Gampong Seutui*, pihak aparaturnya telah membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) *seutui* yang bertugas untuk mengatur pelaksanaan program *KOTAKU* dan menyuarakan atau menyalurkan ide-ide masyarakat terkait pelaksanaan program *KOTAKU*, tentu pembentukan badan keswadayaan masyarakat ini tidak dibentuk secara asal-asalan.

Badan keswadayaan Masyarakat inilah yang menjadi penyokong keberhasilan terlaksananya program kota tanpa kumuh di *Gampong Seutui*, pembangunan jembatan dan taman jogging di sepanjang kali ciliwung tentu tidaklah mudah banyak perumahan warga dan padat nya penduduk saat itu yang menjadi alasan permukiman kumuh di *gampong seutui* terbentuk, tentu saja beberapa masyarakat enggan untuk berpindah rumah bahkan wilayah yang mereka tinggali, oleh karena itu lah dibentuknya Badan keswadayaan Masyarakat.

BKM bertugas melakukan permusyawaratan dan mencari solusi bersama kepada masyarakat, tak hanya itu BKM dan masyarakat juga sangat berperan dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun, namun saat ini banyak fasilitas yang telah dibangun seperti tugu rencong dan lampu-lampu jalan yang rusak, tak hanya itu aparaturnya dan BKM juga harus membangun beberapa infrastruktur di sekitaran Pujasera menggunakan dana dari BKM sendiri dan keuntungan dari pujasera tersebut di gunakan sebagai pelatihan dan modal untuk ibuk-ibuk di *gampong seutui* dalam pembukaan usaha umkm.

D. Pembahasan Penelitian

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (*KOTAKU*) di *Gampong Seutui* menghadapi tantangan kompleks, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya, seperti musyawarah rutin yang melibatkan masyarakat, koordinasi yang lebih terorganisasi antara aparaturnya, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung

lainnya masih sangat diperlukan. Hal ini selaras dengan teori Korten yang menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial.

Untuk meningkatkan keberhasilan program KOTAKU di Gampong Seutui, diperlukan penerapan berbagai langkah strategis berdasarkan indikator strategi organisasi, strategi sumber daya, strategi program, dan strategi kelembagaan. Strategi organisasi dapat diwujudkan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga dengan membentuk forum komunikasi rutin.

Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan visi, mengurangi duplikasi tugas, dan meningkatkan sinergi antara aparatur gampong, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, aparatur gampong dapat menggunakan musyawarah rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musyawarah ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi, tetapi juga menjadi langkah untuk memetakan kawasan prioritas yang memerlukan intervensi mendesak.

Dari sisi strategi sumber daya, pengelolaan anggaran menjadi aspek penting yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya alokasi dana yang cukup dan berkelanjutan untuk pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Selain itu, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat berperan aktif dalam mengembangkan program penggalangan dana melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Tidak hanya sumber daya finansial, sumber daya manusia juga perlu diperkuat. Kapasitas aparatur gampong dan anggota BKM dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang relevan, seperti pelatihan perencanaan strategis, pengelolaan dana, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan program secara real-time juga menjadi langkah penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

Dalam strategi program, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun merupakan hal yang krusial. Fasilitas seperti Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) dapat dimaksimalkan melalui pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan. Langkah ini bertujuan menjadikan Pujasera tidak hanya sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Infrastruktur lainnya, seperti jalan dan taman, harus dirawat secara berkelanjutan melalui kampanye kebersihan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Upaya ini akan menanamkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan infrastruktur.

Dari aspek strategi kelembagaan, BKM memiliki peran kunci dalam memastikan keberhasilan program KOTAKU. Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, BKM dapat menjalankan fungsi koordinasi, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mengelola dana pembangunan dengan transparansi. Dukungan kelembagaan yang lebih kuat, seperti pelatihan anggota BKM dan pendampingan dari pemerintah, akan meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan program secara mandiri dan efektif. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah kota, BKM, dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal.

Dengan penerapan strategi yang mencakup organisasi, sumber daya, program, dan kelembagaan, program KOTAKU di Gampong Seutui dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, layak huni, dan bebas dari kawasan kumuh

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program KOTAKU di Gampong Seutui telah menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pendanaan. Meskipun demikian, strategi organisasi, sumber daya, program, dan kelembagaan yang dijalankan aparatur gampong, termasuk pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), telah berhasil menghasilkan perubahan signifikan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah gampong, masyarakat, dan lembaga terkait sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan hasil pembangunan serta memastikan efektivitas program dalam jangka panjang.

Untuk memperkuat keberhasilan program, diperlukan langkah taktis yang terarah bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu membentuk forum komunikasi rutin guna memperkuat koordinasi dan melakukan monitoring serta evaluasi berkala bersama BKM. Pemerintah daerah harus menjamin alokasi dana yang berkelanjutan, sementara BKM dapat mengembangkan penggalangan dana mandiri atau kolaborasi dengan sektor swasta. Aparatur gampong dituntut meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi intensif, gotong royong, dan kampanye kebersihan. Di sisi lain, infrastruktur yang

telah dibangun, seperti Pujasera, perlu dioptimalkan sebagai pusat pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, program KOTAKU dapat beroperasi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Gampong Seutui.

Referensi

- Adiwijaya, S., & Harefa, anugrah tatema. (2024). *buku ajar metode penelitian kualitatif* (Efitra (ed.)). pt sonpedia publising indonesia.
- Afrina, S. (2021). Identifikasi Faktor Penyebab Utama Kekumuhan Permukiman di Dusun Tengku Muda, Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 5(268), 58–64.
- Afrizal. (2019). Resmikan Infrastruktur Program ‘Kotaku’, Aminullah: Tahun 2020 Banda Aceh Bebas Kawasan Kumuh. Pemerintahan Kota Banda Aceh. <https://bandaacehkota.go.id/berita/13711/resmikan-infrastruktur-program-kotakuaminullah-tahun-2020-banda-aceh-bebas-kawasan-kumuh.html>
- Ardila, S., Fuady, Z., & Zahriah. (2021). Identifikasi Timbulnya Kawasan Kumuh di Kota Banda Aceh(Studi Kasus : Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 5(1), 47–53.
- Damanik, I. I. (2022). Resilience Principle Aspects of Urban Kampung Ledok Timoho Yogyakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1058(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1058/1/012020>
- Fitri Yulia, Bambang Istijono, & Benny Hidayat. (2024). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menangani Permukiman Kumuh Di Kota Padang. *Jurnal Niara*, 16(3). <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18758>
- Haekal, T. M., Marzaniar, P., Azmi, K., Idris, M. I., & Luddin, F. (2024). Strategi Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di SDN 24 Peusangan. *EduCompassion: Jurnal Integrasi Pendidikan Islam Dan Global*, 01(02), 64–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.52496/anfmw773>
- Hariyanti, A., Muhammadiyah, U., Raya, P., Kalimantan, C., & Side, S. (2019). Strategi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah The Strategy Of Drug Abuse Prevention Program At The National Narcotic Body Of Central Kalimantan Province Abstrak. *Pencerah Publik*.
- Idawati, D. E. (2020). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Penerapan

- Kampung Warna di Bantaran Krueng Dhoe. *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of the Built Environment)*, 7(1).
<https://doi.org/10.24843/jrs.2020.v07.i01.p03>
- John w. Creswell. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Research Design Third Edition* (Third Edit).
- Karina, T. A., Rahardjo, P., & Santoso, J. (2022). Penerapan Program Kotaku Dalam Mengatasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kampung Rawa Barat, Kelurahan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(2), 3229. <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i2.12870>
- Maulana, M. F., & Ahmady, I. (2022). ... KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial*
- Meisy M. P. Bidara, Wiesje F. Wilar, T. L. (2022). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 92–105.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/42655>
- Mesi Sulastri, Efendi, E. G. (2021). Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada Permukiman Kumuh Di Desa Koto Baru Kec. Koto Baru Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 3(2), 13–21. [file:///E:/jurnal/405-Article Text981-1-10-20210205.pdf](file:///E:/jurnal/405-Article%20Text981-1-10-20210205.pdf)
- Zahratuddini, A., Zainuddin, Z., & Rizkiya, P. (2022). PENGARUH REVITALISASI KAWASAN KRUENG DAROY TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(2). <https://doi.org/10.14710/jpk.10.2.160-166>
- Zubaidah, S., Widianingsih, I., Rusli, B., & Saefullah, A. D. (2023). Policy Network on the Kotaku Program in the Global South: Findings from Palembang, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/su15064784>